



Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Much Sari'ul Fahmi

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : muchsariulfahmi@gmail.com

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

M Kendry Widiyanto

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : kenronggo@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis : muchsariulfahmi@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to analyze and describe how the Village Head's leadership is in realizing Good Governance from a New Public Leadership perspective in Krikilan Village, Driyorejo District, Gresik Regency. This research data collection technique was carried out through observation and interviews in the field. The results of this research are that the Village Head's leadership in realizing Good Governance from the perspective of New Public Leadership in Krikilan Village, Driyorejo District, Gresik Regency has shown that indicators of the Leadership Role in terms of Accountability, Transparency and Openness have not been fully implemented well. Meanwhile, Network Management indicators in terms of Accountability, Transparency and Rule of Law have been implemented well. Meanwhile, indicators of Public Value as a Result of Effective Public Leadership in terms of Accountability, Transparency and Rule of Law have been implemented well. Furthermore, the Accountability indicators in terms of Network Management and Public Value as a Result of Effective Public Leadership have been implemented very well, while the Transparency indicators in terms of Network Management and Public Value as a Result of Effective Public Leadership have been implemented well. Then the Openness indicators in terms of Leadership Role, Network Management, and Public Value as a Result of Effective Public Leadership have not been fully implemented properly and optimally. Finally, the indicators for the Rule of Law in terms of Leadership Role, Network Management, and Public Value as a Result of Effective Public Leadership have been implemented very well.*

Keywords: *Good Governance, New Public Leadership, Krikilan Village.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good Governance* pada perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara di lapangan. Hasil dalam penelitian ini bahwa Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good Governance* pada perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah menunjukkan indikator Peran Kepemimpinan dari segi Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Sedangkan indikator *Network Management* dari segi Akuntabilitas, Transparansi, dan Supremasi Hukum sudah dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indikator Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif dari segi Akuntabilitas, Transparansi, dan Supremasi Hukum sudah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya indikator Akuntabilitas dari segi *Network Management* dan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif sudah dilaksanakan dengan sangat baik, Sedangkan indikator Transparansi dari segi *Network Management*, dan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 07, 2024; Published: Agustus 31, 2024;

* Much Sari'ul Fahmi, Mastinamaksin@upm.ac.id

Kepemimpinan Publik Yang Efektif sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian indikator Keterbukaan dari segi Peran Kepemimpinan, *Network Management*, dan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Terakhir indikator Supremasi Hukum dari segi Peran Kepemimpinan, *Network Management*, dan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

Kata Kunci: *Good Governance*, *New Public Leadership*, Desa Krikilan.

A. PENDAHULUAN

Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Otonomi Desa). Merujuk pada entitas hukum yang mencakup Desa konvensional dan Desa Adat atau bisa juga memiliki arti lain yang selanjutnya disebut sebagai Desa. Sebagai badan pemerintah yang berinteraksi langsung kepada masyarakat peran Desa sangat penting dalam memberikan layanan kepada publik. Menurut (Suryani, 2019) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar pada asas kepastian hukum, ketertiban penyelenggaraan pemerintahan, ketertiban kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, tanggung jawab, efisiensi, efektifitas, kearifan lokal, keberagaman, dan inklusi. Prinsip-prinsip tersebut sejalan pada konsep tata kelola Pemerintahan Desa yang baik atau biasa disebut *Good Governance*.

Adapun faktor yang mungkin berdampak antara lain yaitu kepemimpinan, ruang kantor, maupun kompensasi atau gaji, sehingga jadi sangat penting. Untuk itu perlu dilaksanakan kinerja yang baik dari seluruh para pegawai (Amrulloh & Pramusinto, 2017). Adapun beberapa faktor yang mungkin memiliki pengaruh termasuk kepemimpinan, fasilitas kantor, dan kompensasi yang dianggap sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu kinerja organisasi pada dasarnya bergantung pada kinerja individu didalamnya. Penelitian dari (Amrulloh & Pramusinto, 2017) juga mengatakan ada berbagai indikator yang memengaruhi kinerja meliputi perilaku dan mentalitas (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etos kerja), pendidikan, keterampilan, manajemen kepemimpinan, tingkat pendapatan, gaji dan kesehatan, jaminan sosial, suasana kerja, sarana dan prasarana, teknologi, serta peluang untuk meraih prestasi.

Penelitian dari (Panjaitan, 2019) mengatakan bahwa penyelenggara pemerintahan harusnya menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan publik meliputi Dimensi *Tangible* (Berwujud), Dimensi *Reliability* (Kehandalan), Dimensi *Responsiveness* (Ketanggapan), *Assurance* (Jaminan), Dimensi *Empathy* (Empati). Faktor yang paling penting telah mempengaruhi perilaku dari bawahan untuk mencapai tujuan tertentu seperti halnya Kepala Desa mempunyai peranan yang penting untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* pada sebuah desa dan memiliki sebuah kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia

yang ada pada Pemerintahan Desa, pembangunan desa ini erat kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yakni masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, masalah ketertiban, masalah pertahanan, dan masalah keamanan pada dalam negeri ini. Oleh karena itu masyarakat saat ini masih memerlukan kekuatan dalam banyak aspek kehidupan dan Pembangunan.

Keterampilan pelayanan sangat penting dalam mengelola Pemerintahan Desa dan harus kompeten karena menunjukkan kepada masyarakat bahwa pengelola Pemerintahan Desa berkompeten dibidang manajemen tentang pelayanan publik. Oleh itu sumber daya yang ada pada pelayanan publik tersebut harus memahami kebutuhan masyarakat dan mengetahui bagaimana cara memenuhi serta mewujudkan kebutuhan masyarakat. *New Public Leadership* merupakan suatu bentuk dari kepemimpinan yang kolektif dalam menjalankan pemerintahannya, secara langsung berkolaborasi bersama badan-badan lainnya dengan tujuan mencapai visi dan misi yang berdasarkan tingkat nilai-nilai serta memberikan nilai total yang lebih besar yang dibuktikan dengan keberlanjutan social maupun ekonomi. Secara keseluruhan, kekuatan-kekuatan perubahan ini menghasilkan dua gerakan yang mempertanyakan kapasitas pemerintah sebagai agen utama dalam menyelesaikan masalah masyarakat.

Berdasarkan dari sumber yang sudah di kaji melalui (Suara Jatim News, 2022) warga menyampaikan keluhan bahwa setiap jam 12.00 WIB, kantor Desa Krikilan menjadi sepi dari aktivitas pegawai, hal ini mengakibatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena tempat pelayanan publik seharusnya tidak dibiarkan kosong. Oleh karena itu temuan ini menjadi perhatian media yang akan mencoba mengklarifikasi dengan pihak Kecamatan Driyorejo serta menghubungi Humas Kabupaten Gresik untuk menanyakan mengenai jam kerja pegawai di wilayah Driyorejo, khususnya di wilayah Desa Krikilan dan seluruh wilayah Kecamatan Driyorejo.

New Public Leadership menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam kepemimpinan publik, dimana para pemimpin publik tidak hanya diharapkan untuk memiliki kemampuan administratif dan manajerial yang kuat, tetapi juga harus mampu memimpin dengan visi yang jelas, memotivasi pegawai, dan merespons dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kasus ini penerapan prinsip *New Public Leadership* dapat melibatkan langkah-langkah seperti inovasi dalam pengelolaan waktu kerja, peningkatan keterlibatan masyarakat, pemberdayaan pegawai, serta transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan Pemerintahan Desa. Dengan menekankan prinsip-prinsip *Good Governance* pada perspektif *New Public Leadership* diharapkan masalah yang terjadi di Desa Krikilan dapat

diatasi dengan lebih efektif dan pelayanan publik dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Beberapa penelitian sebelumnya, oleh (Hajizah, 2020) studi kasus dari penelitian tersebut adalah tipe kepemimpinan dalam prinsip *Good Governance* pengalokasian dana desa, dengan studi pada kasus adanya pergantian Kepala Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Yakni bagaimana tentang sebuah kepemimpinan (kekuasaan) yang berada pada Desa Putat lor untuk dijadikan harapan bagi warga khususnya Desa Putat Lor supaya pada saat adanya pembangunan maupun alokasi dana Desa yang mana tidak sekedar untung untuk sebagian dusun saja. Melainkan menjadi pembagian yang secara rata dan lebih menekankan pada sebuah keadilan secara bersama tidak hanya untuk mementingkan sebelah pihak saja tetapi semua juga harus berbagai pihak pada dusun.

Setelah penulis mencermati beberapa penelitian terdahulu yang berfokus pada penyalahgunaan alokasi dana Desa, maka penulis bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good Governance* pada perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Adapun kekurangan dari penelitian ini perlu terus diperbaiki pada penelitian selanjutnya yang meliputi keterbatasan soal akses dalam memperoleh informasi, keterbatasan informan, keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut (Sugiman, 2018) Pemerintahan Desa dipimpin langsung oleh Kepala Desa dan dibantu Aparatur Desa menjalankan tugas sebuah pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Dari konteks kehidupan bernegara, pemerintah sangat penting dalam mengatur masyarakat, melindungi, dan memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini disebabkan karena negara mempunyai sifat memaksa dan eksklusif serta mencakup kedua aspek tersebut. Adanya Pemerintah Desa memungkinkan mereka untuk menguasai dan mengawasi seluruh wilayah dan perbatasannya, sehingga pengaturan menjadi lebih mudah. Maka dari itu tiap daerah harus mempunyai lembaga pemerintahan masing-masing yang meliputi : Desa, Kelurahan, Kabupaten, hingga Pusat.

Pengertian Kepemimpinan

Organisasi memerlukan peran kepemimpinan yang kuat karena pemimpin harus punya pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Karena itu, seorang pemimpin harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni, baik secara

administratif maupun strategis, berperilaku baik, mampu mempengaruhi maupun mengarahkan orang lain, mengambil suatu keputusan, tanggungjawab, menjadi komunikator ide yang baik, cerdas, protektif, dan mampu memotivasi. Selain itu, pemimpin juga harus mampu memberikan pendekatan personal (Human Relations) dengan bawahannya. Berdasarkan berbagai definisi manajemen yang telah disebutkan, maka disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan seni atau proses memotivasi, mempengaruhi, mengkoordinasikan, mendorong, dan mengatur.

Komponen Kepemimpinan

Menurut (Mutamimah 2001:3) dalam (Rahmatullah, 2018) menjelaskan seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mengubah bawahan melalui empat komponen utama, yaitu :

1. *Charismatic Leadership* (Karismatik/berpengaruh terhadap individu),

Seorang pemimpin memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Karyawan dituntut untuk mengembangkan keyakinan dan kepercayaan pada karyawan.

2. *Inspirational Motivation* (Motivasi Inspiratif),

Pemimpin selalu memotivasi dan menginspirasi bawahannya dengan memberikan tugas yang bermakna dan menantang, serta menunjukkan semangat dan optimisme.

3. *Intellectual Stimulation* (Stimulasi Intelektual),

Seorang pemimpin senantiasa mendorong bawahannya secara intelektual untuk menjadi inovatif dan kreatif dalam menemukan solusi baru untuk mengatasi masalah.

4. *Individualized Consideration* (Konsiderasi Individual),

Pemimpin memperhatikan setiap karyawan secara individual, seperti memperhatikan kebutuhan prestasi dan memberikan penawaran gaji yang sesuai.

Pengertian *New Public Leadership*

Menurut (Brookes, Stephen, Grint, Keith. 2010) dalam (Isnaini Muallidin, 2014) Munculnya *New Public Leadership* ini ditandai dengan cepatnya reformasi sektor publik di Inggris Raya pada tahun 1997 sebagai bagian dari program modernisasi pemerintahan yang berdampak sangat luas terhadap negara lain.

Komponen *New Public Leadership*

New Public Leadership memiliki tiga komponen utama yang melekat pada konteks reformasi sektor publik, yaitu :

1. Peran Kepemimpinan

Peningkatan reformasi sektor publik setelah tahun (1997) menjadi bagian dari program modernisasi pemerintah yang lebih luas. Program ini berupaya untuk menjadi lebih terbuka, transparan, dan berfokus pada pelanggan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, hamper sama dengan model Manajemen Publik Baru (*New Public Management*)

2. *Network Management*

Manajemen jaringan menjadi hal yang sangat penting dalam tata kelola kepemimpinan dan manajemen. Menurut Agranoff dan McGuire (2003: 35-36), manajemen jaringan merupakan jenis penting dari model manajemen kolaboratif.

3. Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif

Konsep nilai publik pertama kali dikemukakan oleh Mark Moore (1995) dan kemudian diperluas didalam konteks Inggris oleh Talbot (2007) dan Kelly et al. (2002). Konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi tujuan sosial dan mencapainya dengan mempertahankan kepercayaan publik.

Pengertian *Good Governance*

Menurut (Puspa Dewi, 2018) *Good Governance* memiliki arti yang mengacu pada nilai-nilai yang mendukung aspirasi atau tujuan masyarakat serta mampu dalam meningkatkan suatu kemampuan mereka dalam menggapai kemandirian nasional, pembangunan berkelanjutan, serta keadilan sosial. *Good Governance* menekankan dua hal utama yaitu yang pertama, arah ideal bangsa dalam mencapai tujuan nasional, dan kedua, orientasi ideal negara dalam mencapai tujuan nasional tersebut dengan cara yang efektif dan efisien. (Adisasmita, 2011: 23)

Manfaat *Good Governance*

Penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif memainkan peran penting dan memberikan manfaat signifikan, yang dapat menghasilkan perubahan positif bagi pemerintah daerah, lembaga negara, serta masyarakat. Manfaat dari penerapan *Good Governance* yaitu meminimalkan biaya keagenan, meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan, dan memperbaiki citra publik. (Amin, 2012:39) dalam (Susetyo Arief Hidayat, 2022).

Tujuan *Good Governance*

Menurut Amin (2012:40) dalam (Susetyo Arief Hidayat, 2022), tujuan dari *Good Governance* adalah mencapai target yang telah ditetapkan, memastikan barang milik negara dalam kondisi baik, menjalankan pemerintahan dengan baik, dan menjamin transparansi dalam kegiatan negara. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau ideal dan optimal

dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dalam jangka panjang serta memberikan nilai tukar tambah bagi semua pihak.

Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Good Governance*

Menurut (Yuanida, 2010:18) dalam (Susetyo Arief Hidayat, 2022) terdapat bermacam faktor atau syarat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pencapaian *Good Governance*, yaitu sebagai berikut :

A. Faktor Manusia Pelaksana (*Man*)

Keberhasilan penerapan tata pemerintahan yang baik sangat bergantung pada tata kelola daerah, yang mencakup berbagai unsur tata kelola. Selain itu, peran perangkat atau pegawai daerah juga menjadi faktor penting dalam pencapaian tersebut.

B. Faktor Partisipasi Masyarakat (*Public Participation*)

Keberhasilan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau ideal sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Baik pada sistem maupun individu, masyarakat daerah merupakan bagian integral yang sangat penting pada pengelolaan daerah. Salah satu tanggung jawab masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan mendukung penyelenggaraan negara. Bentuk-bentuk partisipasi aktif masyarakat meliputi :

1. Partisipasi proses membuat keputusan (*Decision Making*);
2. Partisipasi proses pelaksanaan (*Actuation Participation*);
3. Partisipasi proses pemanfaatan hasil (*Cost Benefit Evaluation*);
4. Partisipasi proses mengevaluasi (*Evaluation Participation*).

C. Faktor Keuangan (*Funding or Budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk menilai kapasitas pengorganisasian dan pengelolaan rumah tangga suatu daerah adalah kemandirian keuangan daerah tersebut. Dengan kata lain, faktor ekonomi menjadi elemen penting dalam mengukur pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik pada suatu daerah yang membutuhkan pendanaan atau pembiayaan.

D. Faktor Peralatan (*Tools*)

Faktor peralatan memainkan peran penting didalam penerapan dan pencapaian tata kelola yang baik. Pada konteks ini, peralatan mencakup semua alat atau benda yang digunakan sebagai mempercepat dan memperlancar pekerjaan serta kegiatan pemerintahan guna mencapai dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

E. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and Management*)

Faktor organisasi dan manajemen dapat mempengaruhi penerapan *Good Governance*, karena meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pelaksanaan (Actuating), dan pengendalian (Controlling). Untuk mencapai Good Governance, diperlukan organisasi dan manajemen yang efektif.

Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Indonesia memiliki beberapa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau ideal yang perlu dipatuhi. Penelitian yang didasarkan melalui United Nations Development Program (1997) ini menggunakan sebuah teori prinsip-prinsip *Good Governance* yang mengadopsi pemikiran Sedarmayanti (2004:7) dalam (Lutfianti, 2023). Teori ini terdiri dari empat (4) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum. Yaitu, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Menurut Sedarmayanti (2004:7), akuntabilitas digambarkan sebagai suatu jenis komitmen untuk memikul tanggung jawab atas berhasil tidaknya misi organisasi dengan mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disusun secara berkala. Berdasarkan pada pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah tindakan tanggung jawab aparatur pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak pelayanan.
2. Transparansi Menurut Sedarmayanti (2004:7), transparansi berarti memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat tentang biaya layanan, waktu penyelesaian layanan, prosedur layanan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai layanan publik.
3. Keterbukaan menurut Sedarmayanti (2004:7), keterbukaan memerlukan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk mampu memberikan jawaban dan kritik kepada pemerintah yang dianggap tidak terbuka. Partisipasi atau keterbukaan artinya masyarakat ikut serta dalam proses suatu pengambilan kebijakan untuk menyampaikan saran dan pendapat.
4. Supremasi Hukum menurut Sedarmayanti (2004:7), supremasi hukum bercirikan terjaminnya kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara dalam kaitannya dengan ketertiban umum. Supremasi hukum merupakan perlindungan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, dimana perlindungan hukum harus adil dan harus terlaksanakan tanpa diskriminasi terhadap kedudukan atau pangkat seseorang dalam bermasyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan tujuan menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana kepemimpinan Kepala Desa mewujudkan *Good Governance* dalam perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Metode deskriptif dengan analisis kualitatif memusatkan perhatian pada kajian atau fenomena atau permasalahan nyata yang ada pada saat penelitian dan menguraikan fakta-fakta permasalahan yang diteliti sedemikian rupa sehingga benar-benar melibatkan penafsiran yang rasional dan akurat.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian kali ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good Governance* pada perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan menggunakan indikator teori prinsip-prinsip *Good Governance* menurut Sedarmayanti, (2004:7) dalam Lutfianti, (2023) yaitu, Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Supremasi Hukum dan Teori *New Public Leadership* menurut Van Wart, (2003:221) dalam (Isnaini Muallidin, 2014) yang meliputi : Peran Kepemimpinan, *Network Management* dan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena menurut penulis di Desa Krikilan masih terdapat problematika mengenai dengan ditemukannya indikasi permasalahan yang dilakukan oleh beberapa oknum perangkat desa dalam hal kedisiplinan terhadap waktu kerja yang dapat mengakibatkan pelayanan yang kurang maksimal.

Sumber Data

Sumber data primer merupakan sebuah sumber data yang menyajikan data secara langsung (Sugiyono, 2015). Maka dari itu data ini dapat diambil langsung dari situasi dan kondisi lapangan dan ditulis sebagaimana adanya. Sementara itu Data primer dapat dipergunakan untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Dalam skripsi ini, sumber informasi utama didapat melalui wawancara dengan Kepala Desa, beberapa Aparatur Desa, dan masyarakat Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Menurut Sugiyono dalam bukunya, mengenai sumber data sekunder adalah sumber yang mendapatkan data bukan dari pengumpulan langsung. akan tetapi dapat bisa melalui dokumen (Sugiyono, 2015) Data

sekunder ini sebenarnya dapat digunakan penulis memperoleh melalui buku, majalah, serta literatur lain yang berkaitan dengan topik permasalahan.

Teknik Pengumpulan Data

Mengenai Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti didalam sebuah penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut rinciannya : Observasi adalah metode pengamatan perilaku dan pencapaian tujuan, kondisi lapangan dan lokasi penelitian diamati menggunakan teknik ini. Wawancara adalah pertukaran informasi antara pewawancara dengan narasumber dan digunakan ketika peneliti ingin melakukan survei awal untuk mendapatkan informasi mengenai masalah penelitian atau ketika ingin menggali informasi lebih dalam dari responden (Sugiyono, 2015) dan dokumen bersifat catatan. Dokumentasi ini mencakup seluruh catatan suatu peristiwa masa lampau yang berupa tulisan, gambar, atau karya monumental.

Teknik Analisis Data

Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah suatu teknik analisis data deskriptif kualitatif yang menganalisis semua catatan wawancara informan dan menganalisis tinjauan pustaka. Setelah menganalisis data, kemudian peneliti mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. (2014) dalam (Sugiyono, 2012), yaitu :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), Informasi yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), Proses ini melibatkan pemilihan informasi utama, rangkuman data, identifikasi tema atau pola, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas dan dapat membantu peneliti mengingat serta menemukan data yang relevan. Pemilihan data dilakukan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian.
3. Penyajian Data (*Data Display*), pada penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan melalui teks naratif. Menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip dari (Sugiyono, 2012) penyajian data ini memfasilitasi pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi dan membantu perencanaan tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), Langkah terakhir pada analisis data kualitatif yaitu menarik sebuah kesimpulan. Proses ini melibatkan penemuan makna di balik pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab atau akibat, dan

proposisi-proposisi. Hasil kesimpulan ini diambil sangat hati-hati dengan memeriksa catatan lapangan untuk memverifikasi keakuratan data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Kepala Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* pada perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Pada konteks ini, kepemimpinan yang efektif dituntut untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengambilan keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa menjadi penggerak utama dalam menjamin penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di tingkat Desa. Untuk mengkaji kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan *Good Governance* pada perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui prinsip-prinsip *Good Governance* pada perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik maka dapat ditinjau menggunakan teori indikator teori prinsip-prinsip *Good Governance* menurut Sedarmayanti, (2004:7) dalam Lutfianti, (2023) yaitu, Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Supremasi Hukum dan Teori *New Public Leadership* menurut Van Wart, (2003:221) dalam (Isnaini Muallidin, 2014) yang meliputi : Peran Kepemimpinan, *Network Management* dan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif, yaitu :

1. Peran Kepemimpinan

Dalam konteks *New Public Leadership* di Desa Krikilan, faktor peran kepemimpinan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kepemimpinan tidak hanya terfokus pada individu, tetapi kepada tim dan struktur organisasi Pemerintahan Desa. Kepala Desa harus mampu memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak untuk mengambil keputusan dan melaksanakan program pembangunan. Selain itu, transparansi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan menjadi penting. Pemerintah Desa harus memberikan akses yang lebih mudah dipahami bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan dan program yang diterapkan. Aspek partisipatif juga perlu ditekankan, di mana masyarakat didorong untuk terlibat didalam proses sebuah pengambilan keputusan dan pelaksanaan sebuah program pembangunan. Kolaborasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan pada hasil penelitian, bentuk upaya dalam mewujudkan *Good Governance* Pada Perspektif *New Public Leadership* di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo

Kabupaten Gresik. Dari sebagian pendapat wawancara masyarakat Desa Krikilan menganggap masih belum dilaksanakan secara maksimal tetapi beberapa masyarakat mengatakan sudah maksimal. Namun dari sudut pandang masyarakat terkait faktor peran kepemimpinan jika dilihat dari segi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan supremasi hukum harus terus ditingkatkan, mengingat pentingnya segi tersebut dalam kepemimpinan terlebih lagi buat Kepala Desa maupun Perangkat Desa yang sedang menjalankan sistem pemerintahan. Untuk itu seluruh hambatan-hambatan yang terjadi juga perlu dievaluasi mengenai kinerja Perangkat Desa selama melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. *Network Management*

Faktor *Network Management* di Desa Krikilan menekankan pentingnya pembangunan kemitraan yang kokoh antara pemerintah desa, lembaga pemerintahan lainnya, dan stakeholder lokal. Hal ini tercermin dalam upaya menjalin kerja sama dengan dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten serta pihak swasta untuk memperoleh sumber daya tambahan. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, memungkinkan penyediaan informasi yang jelas dan partisipasi masyarakat didalam proses pengambilan keputusan. Dari hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Krikilan menganggap sudah dilaksanakan dengan sangat baik terkait faktor *Network Management* dari segi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum sehingga Masyarakat Desa puas akan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa terkait faktor ini. Maka dari itu hal seperti ini harus terus diupayakan atau ditingkatkan lebih baik lagi kedepannya agar penilaian masyarakat bersifat positif serta meminimalisir komentar yang buruk terkait program-program kerja yang dijalankan bahkan pelayanan publik yang diberikan setiap harinya.

3. Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif

Di Desa Krikilan, faktor Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif tercermin dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Kepemimpinan yang efektif memastikan pengelolaan sumber daya secara efisien dan transparan, serta implementasi program-program pembangunan yang didasarkan pada partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa juga berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mempromosikan prinsip-prinsip keadilan, inklusi, dan keberlanjutan dalam kebijakan dan program yang dijalankan. Dari beberapa pendapat masyarakat mengenai faktor Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif sebenarnya sudah dijalankan cukup

baik dari segi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan supremasi hukum, hal ini banyak sekali bukti yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa terkait program kerjanya. Akan tetapi masih ditemukan beberapa hambatan mengenai dampak yang ditimbulkan dari proyek Pembangunan Desa yang semakin hari tidak ada respon sama sekali dari pihak Kepala Desa dan Perangkat Desa setempat. Hal ini dapat memicu keluhan-keluhan yang diperoleh masyarakat sehingga nantinya mengganggu aktivitas sehari-hari.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penggunaan dana desa dan pelaksanaan program pembangunan menjadi perhatian utama dalam evaluasi, baik dari perspektif masyarakat maupun internal Pemerintah Desa. Dalam wawancara, masyarakat menekankan pentingnya akuntabilitas, dan menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap anggaran desa. Maka dari itu temuan dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan masyarakat dan aparatur Desa Krikilan terkait layanan publik, masyarakat di Desa Krikilan memberikan penilaian terhadap tingkat akuntabilitas yang beragam, dimana beberapa aspek dianggap sudah terpenuhi sementara yang lain masih mendapat kritik. Namun, dari sudut pandang aparatur desa, mereka merasa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebaik mungkin.

5. Transparansi

Dalam hal transparansi, baik masyarakat maupun Pemerintah Desa memiliki kesadaran akan pentingnya peningkatan. Masyarakat menyoroti kebutuhan akan lebih banyak transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan aksesibilitas informasi publik. Sementara itu, dalam evaluasi internal, Pemerintah Desa mengakui perlunya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan administrasi Desa dan proses pengambilan keputusan. Sementara itu, konteks transparansi baik masyarakat maupun Pemerintah Desa Krikilan menyadari pentingnya meningkatkan aspek ini. Masyarakat menekankan perlunya transparansi yang lebih detail dalam proses sebuah pengambilan keputusan serta aksesibilitas informasi publik terkait kegiatan Pemerintahan Desa. Dari pendapat Perangkat Desa maupun Masyarakat Desa selanjutnya mengenai faktor transparansi dari segi network management sebenarnya sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan maksimal sesuai pada ketentuan yang berlaku di sistem pemerintahan yang dijalankan sehingga buat kedepannya hal-hal seperti inilah yang harus terus diupayakan untuk dipertahankan dan diperbaiki jika terjadi suatu permasalahan agar Masyarakat Desa merasa puas tentang kebutuhan pelayanan publik serta rancangan kerja Perangkat Desa atau Kepala Desa yang sudah dilaksanakan secara maksimal.

6. Keterbukaan

Keterbukaan menjadi fokus dalam evaluasi baik dari sudut pandang masyarakat maupun internal pemerintah desa. Masyarakat menekankan keinginan mereka untuk lebih banyak partisipasi dalam proses pembuatan keputusan serta kesempatan yang lebih besar untuk menyuarakan pendapat. Di sisi lain, evaluasi internal menyoroti perlunya membuka saluran komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat dan memfasilitasi partisipasi aktif mereka dalam pembangunan Desa. Keterbukaan menjadi sorotan utama dalam evaluasi, baik dari perspektif masyarakat maupun internal Pemerintah Desa Krikilan. Dengan demikian dari beberapa hasil wawancara diatas mulai Perangkat Desa dan masyarakat dapat disimpulkan sedikit mengenai faktor keterbukaan dari segi peran kepemimpinan sebenarnya sudah terlaksanakan dengan baik akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Perangkat Desa maupun Kepala Desa terlebih lagi penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diperhatikan secara maksimal dan juga tidak membuat kesalahan seperti datang terlambat ke kantor serta pulang cepat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Supremasi Hukum

Permasalahan supremasi hukum menjadi sorotan dalam evaluasi, baik dari perspektif masyarakat maupun internal Pemerintah Desa. Masyarakat menyoroti kebutuhan akan penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta perlindungan hukum yang setara bagi semua warga. Sementara itu, evaluasi internal menekankan perlunya Pemerintah Desa untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan pemahaman tentang peraturan serta prosedur hukum di antara staf Desa. Perhatian terhadap supremasi hukum terangkum dalam evaluasi, baik dari perspektif masyarakat maupun internal Pemerintah Desa Krikilan. Dengan demikian dari beberapa hasil wawancara diatas mulai Perangkat Desa dan masyarakat dapat disimpulkan sedikit mengenai faktor supremasi hukum dari segi peran kepemimpinan tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik, yang mana banyak bukti-bukti telah dilaksanakan secara maksimal dari aspek penegakkan hukum di wilayah pemerintahannya sehingga masyarakat Desa merasa aman dengan adanya peraturan hukum yang berlaku apalagi pada saat melakukan pelayanan publik.

E. KESIMPULAN

Peran Kepemimpinan, dari indikator peran kepemimpinan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan maksimal. *Network Management*, dari indikator *Network Management* dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan juga maksimal. Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif, dari indikator ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum sudah terlaksanakan dengan sangat baik dan maksimal. Akuntabilitas, dari indikator ini dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa dari segi *Network Management* dan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Transparansi, dari indikator ini dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa dari segi *Network Management* dan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif sudah dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan. Keterbukaan, dari indikator ini dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa dari segi Peran Kepemimpinan, *Network Management*, dan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Supremasi Hukum, dari indikator ini dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa dari segi Peran Kepemimpinan, *Network Management*, dan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif sudah terlaksanakan dengan sangat baik.

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa rekomendasi maupun saran dari peneliti agar dijadikan sebuah bahan masukan maupun referensi bagi Pemerintahan Desa Krikilan antara lain sebagai berikut :

1. Peran Kepemimpinan, dilihat dari hambatan segi Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan ini dapat diberikan saran dengan membuat program aplikasi absensi fingerprint untuk Perangkat Desa yang terhubung langsung dengan Humas Kabupaten Gresik, memberikan setiap dusun atau rt/rw berupa banner pemberitahuan informasi terkait pelayanan publik misalnya saja program bantuan sosial yang dapat dibaca atau dimengerti Masyarakat Desa Krikilan dengan menerapkan atau merancang kembali program-program kerja seperti bantuan sosial agar jauh lebih baik atau efektif ketika dijalankan atau memberikan bentuk pengarahannya berupa sosialisasi program bantuan sosial dengan Masyarakat Desa, dan membuat kolom absensi berupa foto wajah dengan menggunakan aplikasi timestamp sehingga lebih jelas antara jam datang serta jam pulang atau meninjau ulang peraturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan sesuai dengan Perdes (Peraturan Desa).

2. Kemudian Network Management, dilihat dari hambatan segi Keterbukaan ini dapat diberikan saran dengan membuat kotak saran atau kritik online melalui aplikasi Web Desa atau membuat program survey kepuasan masyarakat melalui link google form dan lebih mendengarkan lagi saran maupun kritikan dari masyarakat.
3. Sedangkan Nilai Publik Sebagai Hasil Dari Kepemimpinan Publik Yang Efektif, dilihat dari hambatan segi Keterbukaan ini dapat diberikan saran dengan memberikan pengarahan terkait mekanisme proyek pembangunan Desa kepada masyarakat misalnya saja menambahkan plakat berupa tulisan himbauan agar berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan bisa juga mengarahkan alternatif jalan lainnya serta lebih mendengarkan keluhan masyarakat atau merespon secara tanggap perihal pembangunan tersebut dengan mengadakan bentuk sosialisasi kepada Masyarakat Desa mengenai keluhan yang diberikan kepada Perangkat Desa maupun Kepala Desa terkait kinerja yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, A. M. K., & Pramusinto, H. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Fasilitas Kantor, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Se-Kecamatan Sukorejo. *Economic Education Analysis Journal*, 6(3), 912–922.
- Hajizah, N. (2020). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance, studi kasus dari penelitian tersebut adalah Tipe Kepemimpinan Dalam Pengalokasian Dana Desa: Studi kasus Pergantian Kepala Desa Putatlor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Repository Unair*, 1–3.
- Isnaini Muallidin. (2014). KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC LEADERSHIP. *UMY Repository*, 1–12.
- Lutfianti, E. N., Wilujeng, S., & Hentika, P. N. (2023). Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 223–236.
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. *Perspektif*, 8(1), 32–38. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2543>
- Puspa Dewi Akuntansi, E., Taman Siswa Jakarta Jl Garuda No, S., & Jakarta Pusat, K. (2018). DAN TRANSPARANSI RENCANA STRATEGI TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (Vol. 7, Issue 2).
- Rahmatullah. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BTPN Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa. Unismuh Makassar.

suara jatim news. (2022). jam-kerja-kelurahan-krikilan-kecamatan-driyorejo-kabupaten-gresik-diduga-sudah-tidak-ada-pelayanan-mulai-jam-12-siang/.

Sugiman. (2018). PEMERINTAHAN DESA. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta .

Sugiyono. (2015). Metode_Penelitian_Pendidikan_Sugiyono_20.

Suryani, D. A. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggunharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 52. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1361>

Susetyo Arief Hidayat. (2022). ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA KANTOR KECAMATAN SEMARANG TIMUR). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG.